



DINDUKCAPIL ANDALKAN LAPORAN DARI WILAYAH

Penduduk Telantar Jadi Sasaran Tertib Adminduk

YOGYA (KR) - Perekaman dan pencetakan KTP elektronik tidak hanya berlaku bagi penduduk yang administrasi kependudukan (adminduk)-nya sudah tercatat di dinas. Penduduk telantar yang sama sekali belum memiliki dokumen juga menjadi sasaran tertib adminduk.

Penduduk telantar tersebut masuk kategori warga dengan rentan adminduk. Penduduk rentan itu kelompoknya ialah orang-orang telantar administrasinya. Mereka sudah lama tinggal di Kota Yogya namun tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali," ungkap Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogya Bram Prasetyo, Jumat (13/3).

Dindukcapil Kota Yogya sejauh ini belum memiliki data pasti jumlah penduduk yang rentan adminduk tersebut. Oleh karena itu, lanjut Bram, pihaknya sangat mengandalkan laporan dari wilayah terutama petugas di kecamatan. Setiap laporan dari kecamatan yang masuk, akan langsung ditelusuri

oleh tim dari Dindukcapil Kota Yogya.

Dalam penelusuran tersebut, Bram mengaku sekaligus mendata penduduk rentan atau telantar. Selanjutnya diberikan dokumen berupa surat keterangan pengganti tanda identitas. Melalui surat tersebut, yang bersangkutan akan diproses menjadi penduduk Kota Yogya. Bagi yang sudah masuk dalam wajib KTP, maka dilanjutkan dengan perekaman biometrik. Sedangkan yang belum wajib KTP, diberikan berita acara yang dilaporkan ke aparat kepolisian. "Sejak Januari hingga Maret ini sudah 15 orang penduduk telantar yang sudah kami proses adminduknya. Rata-rata mereka sudah cukup lama terpisah dari keluarganya kemudian mengembara hingga di Kota Yogya," tandasnya.

Bagi penduduk telantar yang sudah direkam kependudukannya secara biometrik, tidak lantas diterbitkan KTP elektronik. Petugas Dindukcapil Kota Yogya perlu melakukan penelusuran data terlebih dahulu. Jika data biometrik sudah tunggal atau tidak ditemukan data ganda, maka baru bisa ditindaklanjuti untuk pencetakan KTP elektronik.

Bram menambahkan, selain menyisir penduduk telantar mereka juga menggencarkan perekaman jemput bola di kelurahan. Terutama bagi penduduk yang memiliki keterbatasan fisik maupun kesehatan sehingga tidak mampu datang ke kecamatan maupun dinas. Di samping itu, orang dengan gangguan jiwa juga tak luput dari perekaman untuk memperoleh KTP elektronik. "Keluarga yang memiliki orang dengan gangguan jiwa sangat membutuhkan KTP elektronik. Tujuannya agar bisa mengakses layanan kesehatan. Tapi sejauh ini baru empat orang yang sudah kami terbitkan," katanya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005